

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Todaro & Smith (2014) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup dari sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, atau dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan. Menurut World Bank (2019) menilai bahwa ketimpangan antardaerah tetap menjadi tantangan meski pemerintah sudah cukup berhasil menekan angka kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020). Menurut BPS pula bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari.

Haughton dan Khandker (2012:157) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diakibatkan karena kurangnya kesejahteraan. Hampir di setiap Negara, kemiskinan selalu terpusat di pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Jumlah penduduk miskin yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor,

diantaranya dapat disebabkan oleh karena sulitnya memenuhi kebutuhan dasar, sulitnya memperoleh pendidikan dan pekerjaan. Sulitnya seseorang dalam memperoleh pendidikan akan menyebabkan seseorang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Seiring perkembangan zaman lapangan kerja yang tersedia akan mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dalam masa pendidikan banyak masyarakat yang tidak menempuh sebagaimana mestinya maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kesulitan mencari pekerjaan ini akan mengakibatkan seseorang kesulitan memperoleh pendapatan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pembangunan nasional dapat meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi masyarakat. Pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidaksetaraan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2014:18).

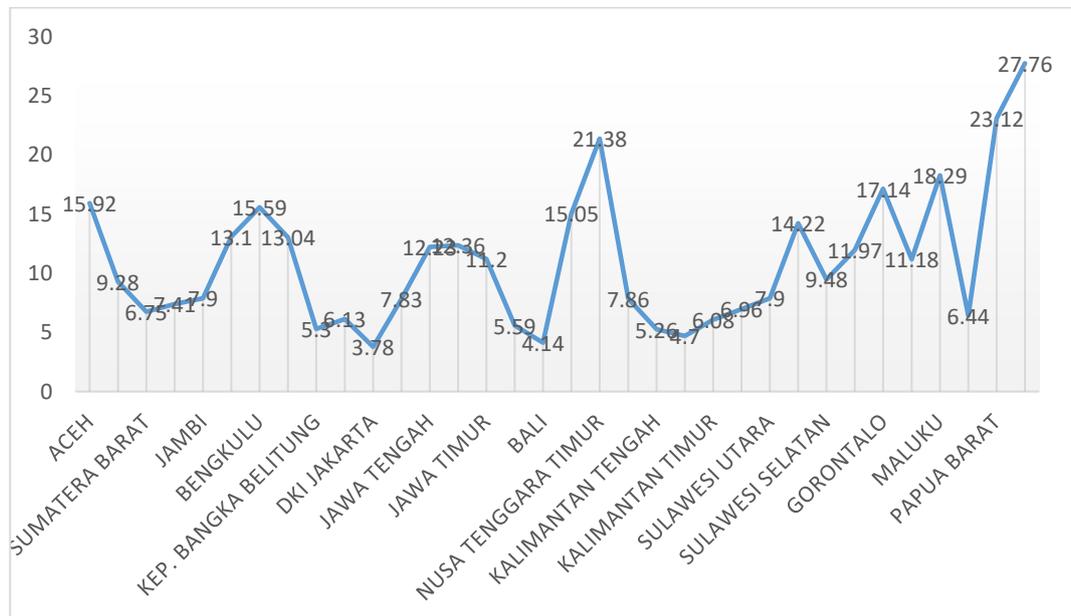
Salah satu tujuan dari pembangunan ialah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat disebut sejahtera apabila masyarakat tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kemiskinan yang membatasi kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memahami dinamika perekonomian suatu wilayah dengan melihat percepatan perekonomiannya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya kenaikan permintaan akan barang dan jasa, artinya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa akan meningkat, sehingga secara tidak langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan yang selalu diidentikkan dengan tidak mampunya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.

Maka dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

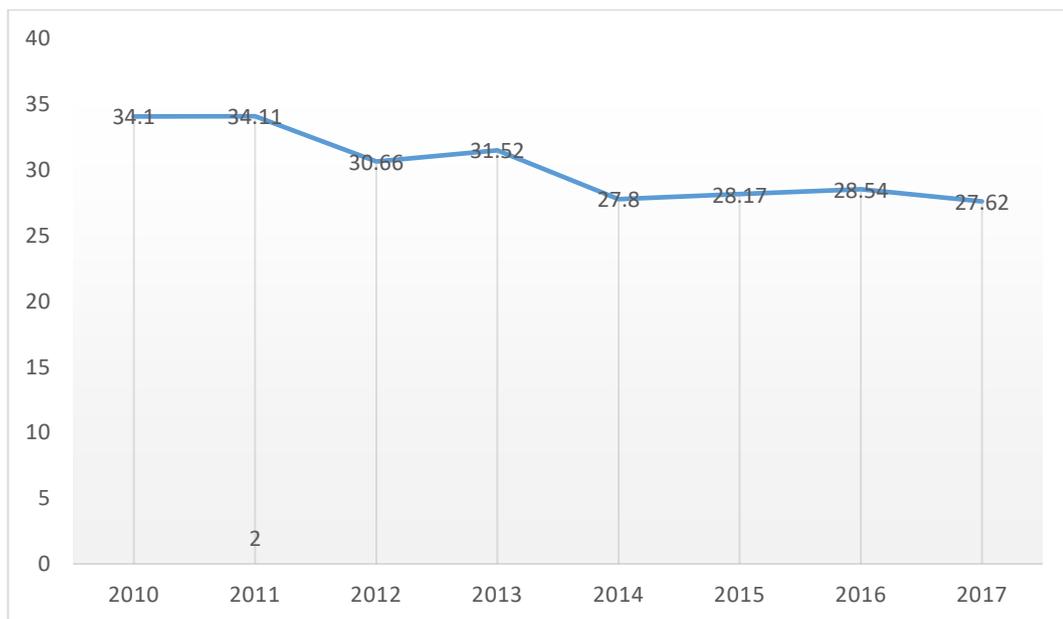
Berbagai kegiatan pembangunan nasional dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satunya dengan mengarahkan berbagai kegiatan pembangunan ke daerah-daerah, khususnya pembangunan pada daerah yang relatif memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan sendiri dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang nasional. Salah satu daerah yang masih memiliki masalah dengan kemiskinan yaitu Provinsi Papua. Menurut World Bank (2019), Papua masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di mana masih ada 27,5 persen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Berikut adalah gambar 1.1 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia pada tahun 2017 (%).



Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017
 Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin tertinggi berada di provinsi Papua. Maka dari itu, pembahasan dalam penelitian ini berpusat pada provinsi Papua. Masalah jumlah penduduk miskin di Papua sampai saat ini masih sulit untuk diatasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 mengenai jumlah penduduk miskin di provinsi Papua berikut ini:



Gambar 1.2
Penduduk miskin Di Provinsi Papua (Persen), 2010-2017

Sumber: BPS

Pendekatan pembangunan tradisional lebih difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak serta merta diukur berdasarkan PDRB semata, akan tetapi juga harus memerhatikan pemerataan dalam pendistribusian pendapatan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan suatu wilayah.

Seperti halnya PDRB Pendidikan pun dapat mempengaruhi setiap peningkatan maupun penurunan jumlah kemiskinan. Pendidikan adalah upaya paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakatnya menjadi SDM yang berkualitas, selain itu juga agar dapat mengurangi kemiskinan yang ada banyaknya orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan untuk merubah taraf kehidupannya.

Upaya menurunkan tingkat kemiskinan merupakan hal yang penting, hal ini bisa dibarengi dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin, sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan jenis data yang digunakan adalah data panel dalam periode waktu 2010-2017. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Jumlah Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Periode 2010-2017”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Studi mengenai Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Jumlah Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan telah dilakukan di beberapa Negara, yaitu di Bangladesh dan Cina oleh Begum, Deng dan Gustafsson (2012) dalam *“Economic Growth and Child Poverty Reductin in Bangladesh and China”* menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk pengurangan kemiskinan dalam perspektif waktu yang lebih lama, jika pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi pada

mereka yang lebih miskin, maka ketimpangan pendapatan serta kemiskinan akan menurun, sedangkan jika pertumbuhan terkonsentrasi pada mereka yang lebih makmur, ketidaksetaraan akan meningkat dan kemiskinan mungkin berkurang atau tidak. Di Romania oleh Mihai, Titan dan Manea (2015) dalam *“Education and Poverty”* menjelaskan bahwa sebagian besar anak-anak yang lahir dalam kemiskinan, mereka memiliki peluang keberhasilan dalam pendidikan yang lebih rendah, sehingga menghasilkan kemungkinan kegagalan pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai kegagalan ini, peluang keberhasilan mereka sebagai orang dewasa terbatas, yang dapat membuat kita berpikir tentang pengucilan sosial.

Di Sub-Saharan Afrika oleh Cazzavillan, Donadelli dan Persha (2013) dalam *“Economic Growth and Poverty Traps in Sub Saharan Africa ; The role of education and TFP shock”* menjelaskan bahwa Afrika terjebak dalam perangkap kemiskinan, terlalu miskin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di Afrika selama 1980-2000 adalah negatif, dan berpendapat bahwa negara-negara Afrika memiliki kondisi kesehatan terburuk di planet ini serta stabilitas pemerintah terendah. Temuan empiris yang ada juga menemukan bahwa sebagian besar negara berkembang yang miskin pada tahun 1950 tetap demikian hingga saat ini, dan sebagian besar dari negara-negara ini termasuk dalam wilayah sub-Sahara.

Sedangkan di level Indonesia, penelitian yang berjudul *“Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016”* telah dilakukan oleh Giovanni (2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah, yaitu pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan dan pengangguran. Untuk melihat kinerja perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari indikator PDRB. Pengentasan kemiskinan juga dapat dilihat dari pembentukan sumber daya manusia melalui tingkat pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan tingkat produktivitas seseorang. Selain itu masyarakat yang berada dalam kondisi

pengangguran, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan akan menyebabkan kemiskinan.

Di provinsi Sumatera Barat penelitian dilakukan oleh Gumila, Harahap dan Tasri (2013). Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat” ini, peneliti menjelaskan bahwa selain masalah kemiskinan, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang sangat besar akan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, antara lain besarnya angka pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah. Pengangguran tersebut juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Di Sumatera Barat, tingkat pendidikan dapat diukur salah satunya dengan besarnya angka melek huruf.

Penelitian juga dilakukan di provinsi Jawa Tengah oleh Bintang dan Woyanti (2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh empat variabel pembangunan ekonomi, yaitu: laju pertumbuhan PDRB, pendidikan, kesehatan dan pengangguran. PDRB adalah sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, sedangkan pendidikan dan kesehatan untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi produktivitas, dan pengangguran untuk menggambarkan kemampuan suatu struktur perekonomian dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Di provinsi Sumatera Selatan penelitian dilakukan oleh Sari, Anwar dan Darussamin (2016) dengan judul “Analisis PDRB, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2013”. Peneliti menjelaskan bahwa untuk menurunkan tingkat kemiskinan, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan. Pendidikan juga berpengaruh besar dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang akan digunakan saat bekerja. Selain itu, pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur, tentunya

akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Namun, sejauh pengetahuan penulis, belum ada studi secara khusus yang dilakukan di provinsi Papua. Pemilihan wilayah penelitian dilakukan karena provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Kesenjangan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada pengukuran tingkat pendidikan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari, Anwar dan Darussamin (2016) menggunakan presentase Angka partisipasi Sekolah (APS) antara usia 19-24 tahun. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan presentase rata-rata lama sekolah di provinsi Papua pada tahun 2010-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Periode 2010-2017.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

- a) Berdasarkan hasil estimasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Papua.
- b) Hasil menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Papua.
- c) Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Papua.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari : (1) Pendahuluan; (2) Tinjauan Pustaka; (3) Metode Penelitian; (4) Hasil Pembahasan; (5) Kesimpulan